

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Pangkalpinang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada didaerah yang terletak di Komplek Perkantoran Kep.Bangka Belitung Jln Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149 dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja Belitung dan Muntok yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada umumnya memerukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor : KEP.118/BKIPM/2012 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2012-2014, Kebijakan strategis BKIPM KKP adalah: • Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis <i>scientific barrier</i> sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.
---	--

- SKIPM Pangkalpinang sebagai satuan kerja BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam *“Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure”* (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan

(2) Pendapatan- LO

-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp.

354.355.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 354.355.000,- atau mencapai 71 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000. Pendapatan Kantor SKIPM Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Jasa (Jasa karantina) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	500.000.000	354.255.000	70,85
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	100.000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	500.000.000	354.355.000	70,87

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Lalu	0	0	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	354.355.000	603.202.000	40,00
Jumlah	354.355.000	603.202.000	58,75

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara
Rp.
5.758.940.592

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.758.940.592,- atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.836.936.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.068.504.000	3.065.578.687	99,90
Belanja Barang	2.768.432.000	2.693.361.905	97,29
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.836.936.000	5.758.940.592	98,66
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.836.936.000	5.758.940.592	98,66

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.065.578.687	3.617.377.608	(15,25)
Belanja Barang	2.693.361.905	3.405.336.179	(20,91)
Belanja Modal	-	318.145.980	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.758.940.592	7.340.859.767	(21,55)

Belanja

Pegawai Rp.
3.065.578.687

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.065.578.687,- dan Rp 3.617.377.608,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.358.714.444	1.783.164.106	31,24
Pengembalian tunjangan fungsional	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	92.641.867	61.991.512	(33,08)
Belanja Honorarium	74.888.000	0	-
Belanja lembur / makan	79.612.000	128.292.000	61,15
Pengembalian belanja lembur	0	0	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.459.722.376	1.643.929.990	12,62
Jumlah Belanja Kotor	3.065.578.687	3.617.377.608	18,00
Pengembalian Belanja Pegawai		-	-

Belanja

Barang Rp.

3.405.336.179

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.405.336.179 dan Rp. 3.217.960.857.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Nama Barang	REALISASI DESEMBER 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.005.663.144	933.821.278	7,69
Belanja Barang Non Operasional	85.796.000	87.378.000	(1,81)
Belanja Jasa	996.367.375	1.162.928.243	(14,32)
Belanja Pemeliharaan	377.664.299	374.177.639	0,93
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	615.406.606	370.553.957	66,08
Belanja Barang Persediaan	324.438.755	289.101.740	12,22
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.405.336.179	3.217.960.857	5,82
Pengembalian Belanja	-	-	-

Belanja

Modal Rp

318.145.980

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 318.145.980 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor		0	0,00
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	31-Dec	Dec-23
Uang Tunai		-
Bank BRI No.acc 006301000914302		-
Jumlah		-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Penerimaan PNBPN langsung disetor ke dalam kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		-
Jumlah		-

Piutang PNB

Rp.0

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp.0,-

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2022

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
Jumlah			-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar
di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Listrik	-	-
Pembayaran Telpn dan Fax	-	-
Pembayaran pengiriman Dokumen	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		-
Jumlah		-

Persediaan Rp
73.355.730

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 73.355.730 dan Rp. 114.709.438 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	31/12/2024	31-Dec-23
Barang Konsumsi	73.355.730	114709438
Barang untuk Pemeliharaan	-	
Suku Cadang	-	
Bahan Baku	-	
Jumlah	73355730	114709438

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau

tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1			-
2			-
3			-
6			-
Jumlah			-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1		-	
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp.
643.068.788

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 31Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 643.068.788,- dan Rp.3.232.044.788 ,-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	643.068.788
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2024	643.068.788

Peralatan dan
Mesin Rp.
5.674.833.996

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 5.674.833.996 dan Rp. 6.636.197.391. Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.674.833.996
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.674.833.996

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
5.418.737.430

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.5.418.737.430 dan Rp. 9.098.990.849. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada gedung dan bangunan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.418.737.430
Mutasi tambah:	-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0
Perjalanan Dinas Pembangunan Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.418.737.430
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.418.737.430

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp1.214.487.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.214.487.100 dan Rp. Rp.1.271.402.750 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.214.487.100
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 30 September 2024	1.214.487.100

Aset Tetap

Lainnya

Rp.61.180.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.61.180.000 dan Rp.61.180.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	61.180.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	61.180.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Rp.

6.616.108.458

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp. 6.616.108.458 dan Rp 07.755.875.386 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang

bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp.0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 16.761.892

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.761.892,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik sebesar Rp 14.981.261,- tagihan telepon sebesar Rp.0, tagihan Surat dinas Pos sebesar Rp. 119.700,- dan Tagihan Internet sebesar Rp. 1.660.931,-.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Listrik	14.981.261
Internet	1.660.931
Tagihan Surat Dinas	119.700
Total	16.761.892

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.
6.469.554.586

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.469.554.586 dan Rp.12.658.649.830,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.354.355.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 354.355.000,- dan Rp.591.615.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 204 2dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	354255000	603.202.000
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Tahun Lalu		0
Pendapatan jasa Karantina Perikanan	100000	0
Jumlah	354355000	603.202.000

Beban Pegawai
Rp.
3.065.578.687

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.065.578.687 dan Rp. 3.617.377.608 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal..

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023
Beban Gaji	1088374675	1270412218
Beban Tunjangan-tunjangan	1741565012	801383040
Beban Uang makan	156027000	245115000
Beban Uang Lembur	79612000	128292000
Jumlah	3065578687	2445202258

Beban

Persediaan Rp.
124.934.108

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 124.934.108 dan 319.782.509. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023
Beban Persediaan Konsumsi	124.934.108	319.782.509
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4927000	
Beban persediaan suku cadang		
Beban Persedian Lainnya		
Beban persediaan bahan baku		135.306.584
Beban Persediaan Rusak/ Usang		-
Jumlah	129861108	455.089.093

Beban Barang
dan Jasa Rp.
1.850.911.279

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.850.911.279 dan Rp. 2.087.584.304. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023
Beban Keperluan Perkantoran	561844307	707104177
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	47520000	114048000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8228651	6336667
Beban Honor Operasional Satker	69992000	118008000
Beban Barang Operasional Lainnya	35062900	52092400
Beban Barang operasional - Penanganan Pandemi COVID 19		
Beban Bahan	28513600	41136000
Beban Honor Output Kegiatan	4896000	8160000
Beban Barang Non Operasional Lainnya		36500000
Beban Langganan Listrik	220089600	201184987
Beban Langganan Telpn	96121	521808
Beban Langganan Air		
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya		
Beban sewa	43665000	39750000
Beban Jasa Profesi	3600000	
Beban Jasa Lainnya	827403100	739550000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19		
Jumlah	1850911279	2064392039

Beban
Pemeliharaan
Rp. 335.729.102

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 335.729.102 dan Rp.380.238.299,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179104306	209380849
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151697796	168283450
Beban bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)		
Beban pemeliharaan Jaringan		
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	4927000	2145000
Beban Persediaan suku cadang		239000
Jumlah	335729102	380048299

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 426.380.751 dan Rp 615.406.606. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	369915576	504137814
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17510000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18000000	38010000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20955175	73258792
Jumlah	426380751	615406606

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		
Beban Persediaan pita,cukai, materai dan legas		
Jumlah		

Beban Bantuan
Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	TH 2021
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		0	0
Jumlah		0	0

Beban

Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
300.082.795

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 300.082.795 Rp 679.512.653 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	154.552.044	223.112.210	(31)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96.983.857	96.983.857	-
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	41.317.688	41.317.688	-
Beban Penyusutan Irigasi	5.983.243	5.983.243	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.245.963	1.245.963	-
Beban Penyusutan Aset tetap yg tidak di gunakan pemerintah			-
Jumlah Penyusutan	300.082.795	368.642.961	(19)
			-
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban lain-lain	-	-	-
Amortisasi	300.082.795	368.642.961	(19)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0
Jumlah		0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Persediaan Rusak/Usang *)	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023
Pendapatan PNPB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Jumlah	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
12.635.457.565

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.635.457.565 dan Rp. 12.975.847.174.

Defisit LO
Rp
(5.732.499.830)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (5.732.499.830) dan Rp (6.737.393.073). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi nilai persediaan	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi aset tetap	-
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-
Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

E.4 Transaksi Antar Entitas

Entitas Rp.

433.403.149,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 433.403.149 dan Rp 6.758.229.517. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	sertifikat kesehatan HC (Kode D)	Sekretariat BKIPM	-
2	sertifikat kesehatan HC (KI-D12)	Sekretariat BKIPM	-
3	sertifikat kesehatan HC (KI-D1)	Sekretariat BKIPM	4.114.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BABUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0. dari total Rp0,- .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kabupaten Belitung	Tanah	
2	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Tanah	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp.

6.452.792.694

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.452.792.694,- dan Rp.12.635.457.565,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional (PN) TA 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp. 111.500.000,- dan realisasi Rp. 98.624.395,- atau 90.64%

Tabel Penjelasan terkait Anggaran Prioritas Nasional TA 2024

Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3989.PDC.001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	29.500.000	26.845.892	91%	Produk	70	70	100%
3989.QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	12.000.000	11.349.263	94.58%	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100%
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	70.000.000	60.429.240	86.33%	Lembaga	10	10	100%
Jumlah		111.500.000	98.624.395	90.64%				

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TA 2024

PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2024

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG**



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649699
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,836,936,000	5,836,936,000	0
2	Belanja	5,758,940,872	5,758,940,872	0
3	Pengembalian Belanja	-280	-280	0
4	Estimasi Pendapatan	500,000,000	500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	354,355,000	354,355,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:43 PM
Tgl Cetak : 16/01/25 6:16 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	73,355,730	114,709,438	(41,353,708)	(36.05)
JUMLAH ASET LANCAR	73,355,730	114,709,438	(41,353,708)	(36.05)
ASET TETAP				
Tanah	643,068,788	3,232,044,788	(2,588,976,000)	(80.10)
Peralatan dan Mesin	5,674,833,996	6,636,197,391	(961,363,395)	(14.49)
Gedung dan Bangunan	5,418,737,430	9,098,990,849	(3,680,253,419)	(40.45)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,214,487,100	1,271,402,750	(56,915,650)	(4.48)
Aset Tetap Lainnya	61,180,000	61,180,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,616,108,458)	(7,755,875,386)	1,139,766,928	(14.70)
JUMLAH ASET TETAP	6,396,198,856	12,543,940,392	(6,147,741,536)	(49.01)
JUMLAH ASET	6,469,554,586	12,658,649,830	(6,189,095,244)	(48.89)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,761,892	23,192,265	(6,430,373)	(27.73)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,761,892	23,192,265	(6,430,373)	(27.73)
JUMLAH KEWAJIBAN	16,761,892	23,192,265	(6,430,373)	(27.73)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,452,792,694	12,635,457,565	(6,182,664,871)	(48.93)
JUMLAH EKUITAS	6,452,792,694	12,635,457,565	(6,182,664,871)	(48.93)
JUMLAH EKUITAS	6,452,792,694	12,635,457,565	(6,182,664,871)	(48.93)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,469,554,586	12,658,649,830	(6,189,095,244)	(48.89)

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Pengguna Anggaran

DEDY ARJEE HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
197805252000031002



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG
Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM
Tgl Cetak : 16/01/25 6:27 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	73,355,730	0
0.0	131111	Tanah	643,068,788	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,674,833,996	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,418,737,430	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	769,438,100	0
0.0	134112	Irigasi	345,372,000	0
0.0	134113	Jaringan	99,677,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	61,180,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,084,355,825
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	808,436,638
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	615,550,480
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	86,584,152
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	21,181,363
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,761,892
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,758,940,592
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	354,355,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	5,847,658,741	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	9,670,000
0.0	391111	Ekuitas	0	12,635,457,565
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	354,255,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	100,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,009,583,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,964	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	79,781,360	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	26,717,016	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	65,405,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,918,024	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	62,570,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	142,938,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,985,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	78,775,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,411	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,033,190	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	120,526	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6,670,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	13,089,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	74,690,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,922,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,363,821,971	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	95,900,405	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	561,844,307	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	47,520,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,228,651	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	69,992,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	35,062,900	0
3.0	521211	Beban Bahan	28,513,600	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	220,089,600	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	96,121	0
3.0	522141	Beban Sewa	43,665,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	827,403,100	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,104,306	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,697,796	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	369,915,576	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,510,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,955,175	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	154,552,044	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,983,857	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41,317,688	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,983,243	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,245,963	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	124,934,108	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,927,000	0
JUMLAH			25,391,293,507	25,391,293,507

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP. 197805252000031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 05/02/25 12:24 PM

Tgl Cetak : 05/02/25 1:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,758,940,592
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	354,355,000	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	354,255,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	100,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,009,583,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,244	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79,781,360	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,717,016	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	65,405,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13,918,024	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,570,880	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	142,938,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,985,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	78,775,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,411	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,033,190	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	120,526	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,670,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,089,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	74,690,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,922,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,363,821,971	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	95,900,405	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	566,273,356	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	47,520,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,169,851	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	69,992,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	35,062,900	0
3.0	521211	Belanja Bahan	28,513,600	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78,837,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	221,086,724	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	159,121	0
3.0	522141	Belanja Sewa	43,665,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	827,403,100	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG
Tgl Data : 05/02/25 12:24 PM
Tgl Cetak : 05/02/25 1:44 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,104,306	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,697,796	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	369,915,576	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,510,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,955,175	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	280
JUMLAH			6,113,295,872	6,113,295,872

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 5 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
197805252000031002



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM
Tgl Cetak : 16/01/25 7:08 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	354,355,000	591,615,000	(237,260,000)	(40.104)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	354,355,000	591,615,000	(237,260,000)	(40.104)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	(354,355,000)	(591,615,000)	237,260,000	(40.104)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,065,578,687	3,617,377,608	(551,798,921)	(15.254)
Beban Persediaan	124,934,108	319,782,509	(194,848,401)	(60.932)
Beban Barang dan Jasa	1,850,911,279	2,087,584,304	(236,673,025)	(11.337)
Beban Pemeliharaan	335,729,102	380,238,299	(44,509,197)	(11.706)
Beban Perjalanan Dinas	426,380,751	615,406,606	(189,025,855)	(30.716)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 7:08 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	300,082,795	679,512,653	(379,429,858)	(55.839)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	(6,103,616,722)	(7,699,901,979)	1,596,285,257	(20.731)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,749,261,722	7,108,286,979	(1,359,025,257)	(19.119)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	9,667,853	(9,667,853)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	(11,587,000)	11,587,000	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	(1,919,147)	1,919,147	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	9,667,853	(9,667,853)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,749,261,722	7,098,619,126	(1,349,357,404)	(19.009)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,749,261,722	7,098,619,126	(1,349,357,404)	(19.009)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalpinang, 16 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kelas Pengguna Anggaran

DEDY PRIF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP 197805252000031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:43 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:42 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,635,457,565	12,975,847,174	(340,389,609)	(2.62)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,749,261,722)	(7,098,619,126)	1,349,357,404	(19.01)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(433,403,149)	6,758,229,517	(7,191,632,666)	(106.41)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,182,664,871)	(340,389,609)	(5,842,275,262)	1,716.35
EKUITAS AKHIR	6,452,792,694	12,635,457,565	(6,182,664,871)	(48.93)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kasasa Pengguna Anggaran

DEDI ABIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP.197805252000031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG 649699

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:37 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,000,000	354,355,000	(145,645,000)	71	194,585,000	603,202,000	(408,617,000)	310
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	500,000,000	354,355,000	(145,645,000)	71	194,585,000	603,202,000	(408,617,000)	310
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	500,000,000	354,355,000	(145,645,000)	71	194,585,000	603,202,000	(408,617,000)	310
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,836,936,000	5,758,940,592	(77,995,408)	99	7,583,515,000	7,340,859,767	242,655,233	97
1. Belanja Pegawai	3,068,504,000	3,065,578,687	(2,925,313)	100	3,785,112,000	3,617,377,608	167,734,392	96
2. Belanja Barang	2,768,432,000	2,693,361,905	(75,070,095)	97	3,477,135,000	3,405,336,179	71,798,821	98
3. Belanja Modal	0	0	0	0	321,268,000	318,145,980	3,122,020	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG 649699

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:37 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,836,936,000	5,758,940,592	(77,995,408)	99	7,583,515,000	7,340,859,767	242,655,233	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG

REPUBLIK INDONESIA

Pangkalpinang, 16 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DEPPARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP 197805252000031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 649699
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/01/25 8:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/1/25 2:47 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,365,568,000	1,009,584,000	1,009,583,200	0	1,009,583,200	100	800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30,000	20,000	15,244	280	14,964	76.22	5,036
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	116,285,000	79,786,000	79,781,360	0	79,781,360	99.99	4,640
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,626,000	26,734,000	26,717,016	0	26,717,016	99.94	16,984
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	99,675,000	65,405,000	65,405,000	0	65,405,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,071,000	14,069,000	13,918,024	0	13,918,024	98.93	150,976
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,424,000	62,573,000	62,570,880	0	62,570,880	100	2,120
511129	Belanja Uang Makan PNS	276,216,000	143,000,000	142,938,000	0	142,938,000	99.96	62,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	22,012,000	6,985,000	6,985,000	0	6,985,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,022,507,000	1,420,756,000	1,420,513,724	280	1,420,513,444	99.98	242,556
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,934,000	78,782,000	78,775,100	0	78,775,100	99.99	6,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	3,000	1,411	0	1,411	47.03	1,589
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,860,000	4,034,000	4,033,190	0	4,033,190	99.98	810
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	715,000	125,000	120,526	0	120,526	96.42	4,474
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,575,000	6,670,000	6,670,000	0	6,670,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,825,000	3,042,000	3,041,640	0	3,041,640	99.99	360
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,954,000	14,310,000	13,089,000	0	13,089,000	91.47	1,221,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	58,864,000	106,966,000	105,730,867	0	105,730,867	98.85	1,235,133
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	120,000,000	74,800,000	74,690,000	0	74,690,000	99.85	110,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	6,000,000	5,000,000	4,922,000	0	4,922,000	98.44	78,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	126,000,000	79,800,000	79,612,000	0	79,612,000	99.76	188,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,527,196,000	1,365,020,000	1,363,821,971	0	1,363,821,971	99.91	1,198,029
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,545,000	95,962,000	95,900,405	0	95,900,405	99.94	61,595
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,577,741,000	1,460,982,000	1,459,722,376	0	1,459,722,376	99.91	1,259,624
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,785,112,000	3,068,504,000	3,065,578,967	280	3,065,578,687	99.9	2,925,313
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	687,192,000	567,794,000	566,273,356	0	566,273,356	99.73	1,520,644

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 649699
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/01/25 8:28 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/1/25 2:47 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114,048,000	47,520,000	47,520,000	0	47,520,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	9,900,000	9,169,851	0	9,169,851	92.62	730,149
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	123,360,000	70,020,000	69,992,000	0	69,992,000	99.96	28,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	70,180,000	35,908,000	35,062,900	0	35,062,900	97.65	845,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,006,780,000	731,142,000	728,018,107	0	728,018,107	99.57	3,123,893
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	33,131,000	43,418,000	28,513,600	0	28,513,600	65.67	14,904,400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	4,896,000	4,896,000	0	4,896,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	41,291,000	48,314,000	33,409,600	0	33,409,600	69.15	14,904,400
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	128,930,000	78,960,000	78,837,400	0	78,837,400	99.84	122,600
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	145,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	273,930,000	78,960,000	78,837,400	0	78,837,400	99.84	122,600
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	240,000,000	222,516,000	221,086,724	0	221,086,724	99.36	1,429,276
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	300,000	159,121	0	159,121	53.04	140,879
522141	Belanja Sewa	80,000,000	43,700,000	43,665,000	0	43,665,000	99.92	35,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,750,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	735,520,000	827,600,000	827,403,100	0	827,403,100	99.98	196,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,065,270,000	1,097,716,000	1,095,913,945	0	1,095,913,945	99.84	1,802,055
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209,650,000	179,500,000	179,104,306	0	179,104,306	99.78	395,694
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189,720,000	154,615,000	151,697,796	0	151,697,796	98.11	2,917,204
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	399,370,000	334,115,000	330,802,102	0	330,802,102	99.01	3,312,898
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	525,137,000	419,855,000	369,915,576	0	369,915,576	88.11	49,939,424
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,230,000	18,330,000	17,510,000	0	17,510,000	95.53	820,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	22,000,000	20,955,175	0	20,955,175	95.25	1,044,825
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	599,367,000	478,185,000	426,380,751	0	426,380,751	89.17	51,804,249
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,386,008,000	2,768,432,000	2,693,361,905	0	2,693,361,905	97.29	75,070,095
	JUMLAH BELANJA	7,171,120,000	5,836,936,000	5,758,940,872	280	5,758,940,592	98.66	77,995,408